



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI II DPR RI  
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

---

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan	: II
Rapat Ke-	: 13
Jenis Rapat	: Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Senin, 7 Desember 2020
Waktu	: Pukul 14.30 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Membahas Aset-aset Negara dan Kinerja Kelembagaan di Lingkungan Kepresidenan
Ketua Rapat	: <b>H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Ketua Komisi II DPR RI</b>
Sekretaris Rapat	: Dra. Hani Yuliasih, M.Si./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 34 (tiga puluh empat) Anggota Komisi II DPR RI dari 48 (empat puluh delapan) Anggota Komisi II DPR RI B. Menteri Sekretaris Negara RI C. Sekretaris Kabinet RI D. Kepala Staf Kepresidenan RI

**I. PENDAHULUAN**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Sekretaris Negara RI, Sekretaris Kabinet RI, dan Kepala Staf Kepresidenan RI, dengan agenda membahas aset-aset negara dan kinerja kelembagaan di lingkungan kepresidenan, hari Senin, 7 Desember 2020, dibuka pukul 14.35 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN**

Pembahasan pada Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Sekretaris Negara RI, Sekretaris Kabinet RI, dan Kepala Staf Kepresidenan RI, dengan agenda membahas aset-aset negara dan kinerja kelembagaan di lingkungan kepresidenan, sebagai berikut:

1. Di Kementerian Sekretariat Negara telah dibentuk Badan Layanan Umum atau BLU Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno

(PPK GBK) dan Badan Layanan Umum atau BLU Pengelolaan Kompleks Kemayoran (PPKK).

2. PPK GBK mengelola lahan seluas 279,08 hektar dan PPKK mengelola lahan seluas 450 hektar.
3. Total aset Setkab, sebagai berikut: Nilai BMN: 76.499.575.628, Penyusutan: 50.613.246.920, dan Nilai Netto: 25.886.328.708.
4. Kantor Staf Presiden telah melaksanakan sejumlah kegiatan, sebagai berikut:
  - 1) Dalam Pengendalian Program Prioritas Nasional, KSP melaksanakan monitoring dan evaluasi sesuai 7 Agenda Nasional atau Prioritas Nasional dengan 35 Program Prioritas, di antaranya:
    - a. Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT) (PN01-PP01);
    - b. Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan, dan Kelautan (PN01-PP04);
    - c. Pembangunan Wilayah Papua (PN02-PP 07);
    - d. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial (PN03-PP 02);
    - e. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan (PN03-PP 03);
    - f. Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial (PN04-PP 03);
    - g. Infrastruktur Pelayanan Dasar (PN05-PP 01);
    - h. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (PN06-PP 01).
  - 2) Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi untuk mendukung Pengendalian Program Prioritas dan Pengelolaan Isu Strategis, dalam pelaksanaannya dibagi ke dalam 2 (dua) bagian yaitu:
    - a. Pengelolaan Strategi Komunikasi Politik yang ditujukan kepada para pengampu kepentingan;
    - b. Diseminasi Informasi yang sesuai dengan bidang yang dipantau Kedeputan Kantor Staf Presiden.
  - 3) Pengelolaan Isu Strategis Pengelolaan Isu Strategis bersama dengan Kementerian dan Lembaga terkait sampai dengan bulan Desember 2020 ini sudah mencapai 355 isu strategis dan 117 isu diantaranya telah diselesaikan, di antaranya:
    - a. Selesaiannya Permasalahan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Pekanbaru – Kandis – Dumai;
    - b. Selesaiannya Pengawasan Penetapan Penerima dan Mekanisme Penurunan Harga Gas Bumi Untuk Industri Tertentu;
    - c. Terbitnya Badan Hukum Yayasan PTLN Monash University Indonesia, dengan diterbitkannya izin prinsip dan izin operasional Monash Uni-Indonesia yang mendorong PTLN lain tertarik untuk masuk ke Indonesia;
    - d. Terbitnya Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/2321/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) di

- Wilayah Terdampak Asap/Kabut Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan pada Masa Pandemi COVID-19;
- e. Persetujuan penyelesaian konflik agraria di Simalingkar dan Sei Mencirim;
  - f. Selesainya pengawalan perubahan terhadap PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Nomor 119/PMK.010/2018. Dampak: Ratarata Utilisasi Produksi Industri Keramik Meningkatkan dari 30% menjadi 70% pada Bulan Oktober 2020;
  - g. Selesainya pengawalan penerbitan UU tentang perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI;
  - h. Terlaksananya pengamanan demo terkait UU Cipta Kerja.

### III. KESIMPULAN RAPAT

Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Sekretaris Negara RI, Sekretaris Kabinet RI, dan Kepala Staf Kepresidenan RI, dengan agenda membahas aset-aset negara dan kinerja kelembagaan di lingkungan kepresidenan, sebagai berikut:

1. Mencermati laporan yang disampaikan Kementerian Sekretariat Negara RI, Dirut BLU PPK GBK dan Dirut BLU PPKK, juga untuk menindaklanjuti kesimpulan Rapat Kerja Komisi II DPR RI pada tanggal 28 Januari 2020, dimana masih diperlukannya optimalisasi pengelolaan dan pengawasan aset serta peningkatan pemanfaatan aset yang tidak digunakan yang memiliki nilai komersial untuk menambah perolehan PNBK, Komisi II DPR RI bersama Kementerian Sekretariat Negara RI akan membentuk Tim Kerja Bersama.
2. Berdasarkan penjelasan Kantor Staf Presiden dalam pengendalian program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis, Komisi II DPR RI meminta Kantor Staf Presiden terus mengoptimalkan kinerja dukungan terhadap Presiden dan Wakil Presiden.

### IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.50 WIB.

Jakarta, 7 Desember 2020  
KETUA RAPAT

  
H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG  
A-270